GEMAH RIPAH LOH JINAWI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

2020

LKIP 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Siliwangi No. 113 Tlp.(0231) 206011 - 206015 Fax. (0231) 206604
Email: inspektorat.crb@gmail.com
CIREBON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Cirebon, 25 Maret 2021
Pit. Inspektur Kota Cirebon

Drs. Asep Gina Muharam
Pembina Tingkat I
NIP. 19690323 199006 1 001

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cirebon Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon ini disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kota Cirebon yaitu: "**SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah"** sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Perwujudan kinerja pada tahun 2020 menjadi menjadi sebuah tantangan, dengan munculnya pandemi *Covid 19*. Efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan Pemerintahan menjadi kunci dan menuntut kami melakukan inovasi serta memaksimalkan berbagai inovasi yang sebelumnya telah diterapkan.

Upaya untuk mengendalikan pandemi *Covid 19* sekaligus menjaga asa dalam mewujudkan visi dan misi di tengah pandemi tentulah tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras berbagai pihak yang bersama-sama menghadapi rintangan dan tantangan demi meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat. Mudah-mudahan segala harapan tersebut mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amin.

Cirebon, 23 Maret 2021
WALIKOTA CIREBON,

DRS. H. NASHRUDIN AZIS, SH

Daftar isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar x

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon 3

1.2.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon 4

1.2.2 Kondisi Demografi Kota Cirebon 6

1.3 Struktur Organisasi 7

1.4 Isu Strategis 9

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 17

2.1 Perencanaan Strategis 17

2.2 Prioritas Pembangunan Daerah 33

2.3 Indikator Kinerja Utama 45

2.4 Perjanjian KInerja 47

2.5 Rencana Anggaran Tahun 2020 50

BAB III Akuntabilitas Kinerja 55

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 2020 56

3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Pencapaian Kinerja..... 62

3.3 Akuntabilitas Keuangan 190

BAB IV Penutup …….. 195

LAMPIRAN

Perjanjiaan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2020

Daftar Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran 2020

Daftar Inovasi Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Tabel 1.1 Luas Wilayah Perkecamatan 6
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Cirebon Menurut Umur 7
Tabel 1.3 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2023..... 15
Tabel 2.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 29
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023 36
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cirebon 45
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020..... 48
Tabel 2.5 Rencana Belanja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 50
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 50
Tabel 3.1 Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasarkan Kode Warna 55
Tabel 3.2 Tabel Predikat Capaian Kinerja 54
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon 56
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon 63
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan 1.1. “Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, Kompetitif, Terlatih dan Inovatif, serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon” Tahun 2020 74
Tabel 3.6 Capaian Sasaran 1.1.1 “ Meningkatan akses dan mutu pendidikan” Tahun 2020 79
Tabel 3.7 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.1 “Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan” Tahun 2020 82
Tabel 3.8 Capaian Sasaran 1.1.2 “Meningkatnya Minat baca Masyarakat” Tahun 2020 83
Tabel 3.9 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.2 “Meningkatknya Minat Baca Masyarakat” Tahun 2020..... 85
Tabel 3.10 Capaian Sasaran 1.1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Cirebon” Tahun 2020 86
Tabel 3.11 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.3 “Meningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” Tahun 2020..... 92

Tabel 3.12 Capaian Sasaran 1.1.4 “Terkendalinya jumlah penduduk” Tahun 2020 ……. 95

Tabel 3.13 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.4 “Terkendalinya Jumlah Penduduk ” Tahun 2020 ……. 97

Tabel 3.14 Capaian Sasaran 1.1.5 “Menurunnya Tingkat Pengangguran” Tahun 2020 .. 98

Tabel 3.15 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.5 “Menurunnya Tingkat Pengangguran” Tahun 2020 …….. 102

Tabel 3.16 Capaian Sasaran 1.1.6 “ Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Pemuda“ Tahun 2020 …….. 103

Tabel 3.17 Daftar Atlet Berprestasi …… 105

Tabel 3.18 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.6 “Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olah Raga” …… 111

Tabel 3.19 Capaian Sasaran 1.1.7 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Tahun 2020 …… 112

Tabel 3.20 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.7 “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak” Tahun 2020 …… 115

Tabel 3.21 Capaian Sasaran Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon Tahun 2019 ……... 116

Tabel 3.22 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.8 “Meningkatnya Peran Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dalam stabilitas perekonomian Kota Cirebon”” Tahun 2020 …….. 118

Tabel 3.23 Capaian Sasaran 1.1.9 “Berkurangnya Penduduk Miskin” Tahun 2020 ……. 119

Tabel 3.24 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.9 “Berkurangnya Penduduk Miskin” Tahun 2020 …… 122

Tabel 3.25 Capaian Sasaran 1.1.10 “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan” Tahun 2020 ……..... 123

Tabel 3.26 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.10 “Meningkatnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk mencapai kedaulatan pangan” Tahun 2020 …….. 126

Tabel 3.27 Capaian Sasaran 1.1.11 “Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Ekonomi Inklusif” Tahun 2020…… 127

Tabel 3.28 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.11 ““Meningkatnya Peran Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan Ekonomi Inklusif” Tahun 2020 …… 126

Tabel 3.29 Capaian Sasaran 1.1.12 “Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama” Tahun 2020 …… 132

Tabel 3.30 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.12. "Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama" Tahun 2020 133

Tabel 3.31 Capaian Sasaran 1.1.13 "Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal" Tahun 2020 134

Tabel 3.32 Data Objek Pemajuan Kebudayaan 135

Tabel 3.33 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.13 "Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal" Tahun 2020 137

Tabel 3.34 Capaian Sasaran 1.1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat" Kecamatan/ Kelurahan Tahun 2020 138

Tabel 3.35 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1.14 "Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat" Kecamatan/ Kelurahan Tahun 2020" Tahun 2020 142

Tabel 3.36 Capaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja, Kapasitas dan Akuntabilitas, serta Inovasi dalam Manajemen Pemerintah.... 144

Tabel 3.37 Data Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 145

Tabel 3.38 Capaian Sasaran 2.1.1 " Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur" Tahun 2020 147

Tabel 3.39 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.1 " Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur" Tahun 2020..... 150

Tabel 3.40 Capaian Sasaran 2.1.2 "Meningkatnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah" Tahun 2020 151

Tabel 3.41 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.2 " Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur" Tahun 2020..... 150

Tabel 3.42 Capaian Sasaran 2.1.3 " Meningkatnya Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan" Tahun 2020.. 156

Tabel 3.43 Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implemantasi Sistam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 157

Tabel 3.44 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.3 "Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan" Tahun 2020..... 150

Tabel 3.45 Capaian Sasaran 2.1.4 "Meningkatnya Maturitas SPIP" Tahun 2020 160

Tabel 3.46 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.4 "Meningkatnya Maturitas SPIP" Tahun 2020 161

Tabel 3.47 Capaian Sasaran 2.1.5 “Meningkatnya Pelayanan Publik” Tahun 2020 ….. 162

Tabel 3.48 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.4 “Meningkatnya Maturitas SPIP” Tahun 2020 ……. 161

Tabel 3.49 Capaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Tahun 2020 ……..... 170

Tabel 3.50 Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 ……. 172

Tabel 3.51 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.6 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Tahun 2020 ……. 175

Tabel 3.52 Capaian Sasaran 2.1.7 “Meningkatnya Kualitas Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah” Tahun 2020 ……. 178

Tabel 3.53 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.7 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” Tahun 2020 ……. 180

Tabel 3.54 Capaian Sasaran 2.1.8 “Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD” Tahun 2020 ……. 181

Tabel 3.55 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.8 “Meningkatnya Kapasitas Kinerja DPRD” Tahun 2020 …….. 183

Tabel 3.56 Capaian Sasaran 2.1.9 “ Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profresional, Handal dan Terintegrasi dalam Menunjang Smart City” Tahun 2020 ……... 184

Tabel 3.57 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.9 Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Profesional, Handal, dan terintegrasi dalam Menunjang Cirebon Smart City” Tahun 2020 ……. 183

Tabel 3.58 Capaian Sasaran 2.1.10 Meningkatkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 …….. 189

Tabel 3.59 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.10 “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” Tahun 2020 ……. 192

Tabel 3.60 Capaian Sasaran 2.1.11 “Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah” Tahun 2020 ……. 193

Tabel 3.61 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.1.11 “Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah” Tahun 2020 ……. 195

Tabel 3.62 Capaian Tujuan 3.1 Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Tahun 2020 196

Tabel 3.63 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Di Kota Cirebon 2014 – 2020 198

Tabel 3.64 Capaian Sasaran 3.1.1 "Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan" Tahun 2020 199

Tabel 3.65 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Strategi Pemecahan Masalah"Sasaran 3.1.1 "Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan" Tahun 2020 205

Tabel 3.66 Capaian Sasaran 3.1.2 "Meningkatya Kapasitas Pelayanan Drainase" Tahun 2020 206

Tabel 3.67 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.1.2. "Meningkatnya Pelayanan Drainase" Tahun 2020 209

Tabel 3.68 Capaian Sasaran 3.1.3 "MENINGKATNYA LAYANAN SARANA ANGKUTAN UMUM MASYARAKAT" Tahun 2020 211

Tabel 3.69 Analisis Tim PKL Kota Cirebon Tentang Proporsi Pemilihan Moda Transportasi tahun 2020 213

Tabel 3.70 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.1.3 "Meningkatnya Layanan Sarana Angkutan Umum Masyarakat" Tahun 2020 215

Tabel 3.71 Capaian Sasaran 3.1.4 "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" Tahun 2020 216

Tabel 3.72 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.1.4. "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim" Tahun 2020 219

Tabel 3.73 Capaian Tujuan 4.1 "Menciptakan Perlindungan Bagi Masyarakat, Mendukung Penegakan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Daerah serta Menumbuhkan Budaya Tertib Masyarakat dan Penyelenggara Pemerintahan Kota Cirebon" Tahun 2020 221

Tabel 3.74 Rekapitulasi Hasil Survey Tingkat Kepuasan terhadap Trantibum Tahun 2020 223

Tabel 3.75 Capaian Sasaran 4.1.1 "Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat" Tahun 2020 179

Tabel 3.76 Nilai Indeks Trantibum di wilayah Kecamatan Kota Cirebon Tahun 2020 226

Tabel 3.77 Nilai Survey Indeks Trantibum di Wilayah Kecamatan Kota Cirebon Per-Faktor Kemanan dan Trantibum Tahun 2020 226

Tabel 3.78 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 4.1.1 “Meningkatnya kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di Masyarakat” Tahun 2020 229

Tabel 3.79 Capaian Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Rasa Nasionalisme dan Kewaspadaan Nasional Tahun 2020 230

Tabel 3.80 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 4.1.2. “Meningkatnya Rasa Nasionalisme dan Keadilan Sosial Tahun 2020 232

Tabel 3.81 Capaian Sasaran 4.1.3 “Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana” Tahun 2020 233

Tabel 3.82 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 4.1.3 “Meningkatnya Pencegahan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana” Tahun 2020 236

Tabel 3.83 Data Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2020 237

Tabel 3.84 Data Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Tahun 2020 238

Tabel 3.85 Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2020..... 239

Tabel 3.86 Rekapitulasi Predikat Pencapaian Kinerja Seluruh Tujuan dan Sasaran StrategisTahun 2020 246

Gambar 1.1 Peta Kota Cirebon 5

Gambar 3.1 Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama 59

Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon, 2011-2019 70

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Gini Rastio 2015-2018 71

Gambar 3.4 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama aekolah 74

Gambar 3.5 Usia Harapan Hidup Saat Lahir 79

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Gender Kota Cirebon 95

Gambar 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2010-2019 101

Gambar 3.8 Persentase Keaktifan Objek Pemajuan Kebudayaan 112

Gambar 3.9 Grafik Hasil Perhitungan IKM Kependudukan dan Pencatatan Sipil..... 139

Gambar 3.10 Rekapitulasi Data Kebakaran Per-Kecamatan 234

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan gambaran akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada publik berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara operasional, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki peran strategis dalam mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen ini menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, dokumen ini menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja. Di era transparansi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah, keberadaan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari kerangka pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, hal yang terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah mekanisme pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pemerintah daerah mendapatkan ruang kewenangan untuk mengelola berbagai sumber daya yang tersedia. Dalam bingkai sistem pemerintahan nasional, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan delegasi untuk menyelenggarakan berbagai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan

Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Statistik, Bidang Persandian, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Pembagian Urusan Bidang kelautan dan Perikanan, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas eksternal dan internal sesuai dengan dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat. Berbekal berbagai target kinerja sebagaimana telah diformulasikan dalam indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertekad untuk menyampaikan informasi capaian Daerah kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat pada umumnya dan warga Kota Cirebon pada khususnya secara baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Tahun 2020 ini memberikan gambaran dan menjelaskan secara utuh dan komprehensif pembangunan maupun pelaksanaan target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 sekaligus juga menggambarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama tahun 2020..

Pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023, sehingga dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dideskripsikan apa saja yang sudah dilakukan dalam mencapai tujuan yang direncanakan dan juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan di Kota Cirebon pada tahun 2020..

1.2 Gambaran Umum Kota Cirebon

1.2.1 Kondisi Geografis Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak di bagian timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi 6,41^{o} Lintang Selatan dan 108,33^{o} Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8 kilometer dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter.

Secara administrasi Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan, 248 Rukun Warga, dan 1.369 Rukun Tetangga dengan luas wilayah administratif sekitar 37,358 km^2 atau sekitar 3.736 hektar dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Sungai Kedung Pane
Sebelah Barat	:	Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon
Sebelah Selatan	:	Sungai Kalijaga
Sebelah Timur	:	Laut Jawa

Dilihat dari wilayah administratif pemerintahan, Kota Cirebon terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan, yaitu:

1) Kecamatan Kejaksan terdiri dari Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kesenden, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Kebon Baru;
2) Kecamatan Kesambi terdiri dari Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Kelurahan Sunyaragi, Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Drajat;
3) Kecamatan Pekalipan terdiri dari Kelurahan Jagasatru, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalipan, dan Kelurahan Pekalangan;
4) Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Lemawungkuk;
5) Kecamatan Harjamukti terdiri dari Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Kecapi, Kelurahan Larangan, Kelurahan Argasunya, dan Kelurahan Kalijaga.

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut.

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota khususnya di bagian selatan , ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau. Namun yang harus menjadi perhatian

adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Peta wilayah Kota Cirebon disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Peta Kota Cirebon

Sumber :Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Tabel 1.1
Luas Wilayah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Harjamukti	17.615	5	76	454
2.	Lemahwungkuk	6.507	4	42	232
3.	Pekalipan	1.561	4	39	186
4.	Kesambi	8.059	5	55	307
5.	Kejaksan	3.616	4	35	183
Jumlah		37.358	22	248	1.369

Sumber : Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2018, diolah

Jika dilihat pada tabel diatas, dari 5 kecamatan, 22 kelurahan, 248 RW dan 1.369 RT, Kecamatan Harjamukti merupakan wilayah kecamatan yang paling luas dan kecamatan Pekalipan merupakan wilayah dengan luas paling kecil.

Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara minimum rata–rata tahun 2017 sebesar 24,13° C dan maksimum rata-rata 31,18º C serta banyaknya curah hujan 2.323,1 mm per tahun dengan hari hujan 87 hari, atau rata-rata 7,25 hari per bulan.

1.2.2 Demografi Kota Cirebon

Penduduk (sumber daya manusia) merupakan bagian penting dari modal pembangunan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya *(input)* produksi sekaligus menciptakan *demand* dan pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi. Namun demikian, jumlah penduduk harus dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah kependudukan (pengangguran, kemiskinan, dan lain- lain) serta perlu ditingkatkan kualitasnya terutama menyongsong era Indonesia Emas tahun 2045.

Jumlah penduduk Kota Cirebon dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2019, penduduk Kota Cirebon berjumlah 340.370 jiwa, bertambah 38.650 jiwa dibandingkan dengan tahun 2013 (301.720 jiwa). Jumlah penduduk laki-laki hampir sebanding dengan penduduk perempuan, yaitu 50,14 persen laki-laki dan 49,86 persen perempuan. Berdasarkan luas wilayah dibandingkan populasi penduduk, kepadatan penduduk Kota Cirebon rata-rata sekitar 8.387 orang per/km2. Hasil proyeksi penduduk menurut kelompok umur bahwa penduduk dengan jumlah sangat banyak terdapat di kelompok umur remaja dan usia produktif , sementara paling sedikit ada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu 5235 jiwa.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur 2019

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
00-04	13.966	12.958	26.924
05-09	15.342	14.321	29.663
10-14	15.423	14.503	29.926
15-19	13.723	12.905	26.628
20-24	14.502	13.914	28.416
25-29	13.779	13.264	27.043
30-34	12.973	12.441	25.414
35-39	14.054	13.889	27.943
40-44	13.062	13.218	26.280
45-49	11.316	11.480	22.796
50-54	9.728	10.407	20.135
55-59	7.350	8.424	15.774
60-64	6.100	7.033	13.133
65-69	4.545	4.829	9.374
70-74	2.332	2.903	5.235
>=75	2.389	3.297	5.686
JUMLAH	170.584	169.786	340.370

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diolah

Komposisi penduduk Kota Cirebon yang menunjukan Bonus Demografi merupakan peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Cirebon, sepatutnya skema perencanaan pembangunan mempertimbangkan aspek bonus demografi ini untuk menjamin strategi dan arah kebijakan yang tepat.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membentuk organisasi perangkat daerah dengan komposisi sebagai berikut

a. Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
b. Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
c. Inspektorat Kota Cirebon;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Dinas Pemadam Kebakaran;
j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
k. Dinas Tenaga Kerja;
l. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p. Dinas Perhubungan;
q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
r. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
v. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
w. Badan Keuangan Daerah;
x. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
y. Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
z. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
aa. Kecamatan sebanyak 5 Kecamatan. :
    1. Kecamatan Kejaksan
    2. Kecamatan Kesambi
    3. Kecamatan Harjamukti
    4. Kecamatan Lemah Wungkuk
    5. Kecamatan Pekalipan

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi.

Isu strategis pembangunan Kota Cirebon dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah pada Tahun N-1 sebelum penyusunan Rencana Pembanngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memperhatikan hasil evaluasi dari laporan kinerja pada tahun N-1 perencanaan tahunan.

Rumusan isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal sesuai dengan dinamika internasional, nasional dan lokal Kota Cirebon. Isu strategis pembangunan Kota Cirebon 5 (lima) tahun ke depan diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) permasalahan pembangunan Kota Cirebon; (2) dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Cirebon; (3) kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Cirebon; (4) kebijakan pembangunan Kota Cirebon yang meliputi RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dan RTRW Kota Cirebon 2011-2031; dan (5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, maka ditetapkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2018-2023 , yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Peningkatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas daya saing ekonomi secara berkelanjutan.
5. Pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.
6. Reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
7. Kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum.

Secara umum isu strategis tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Kota Cirebon sebagai salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 313.325 jiwa. Berdasarkan proyeksi perkembangan penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Cirebon akan mencapai 335.661 jiwa. Jumlah penduduk tersebut kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beban pembangunan. Oleh karena itu perlu dipacu dan didorong dengan berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif, sehingga memiliki keunggulan, handal, berkarakter, dan memiliki daya saing global. Saat ini dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia Kota Cirebon masih dihadapkan pada berbagai hambatan, diantaranya ditunjukan dengan rendahnya ata-rata lama sekolah penduduk Kota Cirebon yang pada tahun 2017 baru mencapai 9,88 tahun, yang artinya tingkat penduduk penduduk Kota Cirebon pada tahun 2017 rata-rata baru mencapai kelas I SMA. Selain peningkatan akses pelayanan Pendidikan bagi seluruh masyarakat usia sekolah *(education for all)* yang harus ditingkatkan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik,.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan juga saat ini belum optimal yang ditandai dengan capaian indeks kesehatan pada tahun 2017 sebesar 79,83 poin dan masih perlu ditingkatkan. Masih adanya kematian bayi (17 kasus), kematian ibu melahirkan, dan berat bayi lahir rendah (168 kasus), kematian anak balita (6 kasus), cakupan pemberian ASI ekslusif (64,26 persen) juga perlau mendapat perhatian. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan layanan kesehatan, serta perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.

Perkembangan isu kualitas dan daya saing manusia ditunjukan dengan pencapaian indikator sasaran yang terkait dengan isu ini yaitu sasaran Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah 13,09 Tahun dan Rata-rata Lama Sekolah yaitu 9,90, kondisi ini lebih baik jika dibandingkan pada kondisi Pra-RPJMD, kendati berbagai upaya yang dilakukan telah mendorong kemajuan, namun isu strategis ini masi rlevan untuk menjadi prioritas pembangunan karena belum mencapai target Akhir dari RPJMD. Kondisi pada tahun 2020 akan dijelaskan pada BAB III Capaian Kinerja. Selain sasaran di lingkup pendidikan, sasaran di lingkup kesehatan yaitu Sasaran 1.1.3 “Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Angka Usia Harapan HIdup pada tahun 2019 adalah 72,13 lebih baik dari kondisi Awal/2018 yaitu 71,90 dan Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu 93,53%, kondisi indikator ini menurun dari kondisi awal/2018 yaitu 99,00. Sehingga disatu sisi terkait Usia Harapan hidup mengalami kemajuan namun di indikator lain mengalami penurunan karena berbagai faktor,sehingga isu ini masih relevan menjadi isu strategis pada tahun 2020.

2. Isu Kemiskinan, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Upaya-upaya penanganan kemiskinan telah dilakukan dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 31,9 ribu jiwa dan pada tahun 2017 turun menjadi 30,19 ribu jiwa atau turun dari 10,54 persen menjadi 9,66 persen, sehingga dalam periode 2013-2017 pemerintah Kota Cirebon berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.710 jiwa atau 0,88 persen atau rata-rata per tahun turun sebesar 0,18 persen. Penurunan jumlah tersebut tergolong lambat, sehingga memerlukan akselerasi melalui intervensi berbagai program dan kegiatan yang tepat sasaran, tepat metode dan cepat dalam penanganannya.

Pada tahun 2019 kondisi kemiskinan adalah 8,41% dari total penduduk, menurun jika dibandingkan kondisi pada tahun 2017 yang sebesar 9,66%, sementara tingkat pengangguran terbuka adalah 8,98% menurun dari 9,06% pada tahun 2018. Hal ini

menunjukan upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti isu strategis ini cukup berhasil dan perlu dipertahankan.

3. Isu Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Kota Cirebon, karena hal ini terkait erat dengan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap pembangunan kotanya. Kesenjangan antar wilayah yang cenderung semakin melebar akan menimbulkan gejolak pembangunan, yang berpengaruh terhadap tingkat kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari nilai indeks gini Kota Cirebon yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,38 menjadi 0,41 pada tahun 2018, yang artinya kesenjangan pendapatan antar masyarakat semakin melebar. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang lambat menjadi salah satu faktor lambatnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mencapai 5,71 persen dan tahun 2018 sebesar 5,79 persen, sehingga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, perekonomian Kota Cirebon hanya tumbuh 0,08 persen.

Prinsip pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan oksigen (O_2) juga akan meningkat, begitu pula ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian untuk pemenuhannya. Selain hal tersebut pada tahun 2017-2018 pengelolaan sampah masih menjadi tantangan karena tingginya volume sampah dan belum adanya pengelolaan TPA yang memenuhi kaidah ramah lingkungan.

Perkembangan Isu Strategis ini terlihat pada data yang ditunjukan pada tahun 2019, pada tahun 2019 Indeks Gini Rasio 0,43 sementara pertumbuhan ekonomi yang ditunjukan Pendapatan atau PDRB ADHB Perkapita dan indeks daya beli mengalami penguatan, hal ini menunjukan disatu sisi kondisi ekonomi meningkat namun masih terjadi sedikit peningkatan kesenjangan. Pada isu lingkungan, tahun 2019 Indeks Lingkungan HIdup Kota Cirebon 56,92, meingkat jika disbanding kondisi awal 44,05. Data perkembangan tersebut menunjukan upaya yang telah dilaksanakan menunjukan keberhasilan namun perlu ditingkatkan.

Isu Produktivitas Daya Saing Ekonomi Secara Berkelanjutan.

Daya saing ekonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Daya saing daerah merupakan salah satu tinjauan tingkat keberhasilan pembangunan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk bertahan dalam menghadapi tantangan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Daya saing ekonomi daerah dapat dilihat dari (1) tingkat produktifitas angkatan kerja yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal; (2) kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen kapasitas keuangan daerah yang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian kota; (3) kinerja BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD; (4) angka kejadian kriminalitas; (5) ketergantungan penduduk, yang menunjukan rasio antara penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk produktif; (6) iklim investasi. Indikator daya saing daerah lainya yang erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon adalah daya beli masyarakat. Data Tahun 2016 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Cirebon berada ada kisaran Rp. 10.916 ribu.

Pada tahun 2019-2020 isu produktivitas dan daya saing berkelanjutan tergambarkan kondisinya dengan nilai indeks daya beli masyarakat Kota Cirebon, pada tahun 2020 indeks daya beli diukur dengan rumus $\frac{\ln(dbKota\ Cirebon)-\ln(db\ MinimumNasional)}{\ln(dbmaksimum\ nasional)-\ln(db\ Minimum\ nasional)}X100 = \frac{\ln(11800)-\ln(1007{,}436)}{\ln(26572{,}352-1007{,}436)}X100 = 75{,}2.$

ln=logaritma natural, daya beli tertinggi nasional adalah wilayah Jakarta Selatan 26.572,2352 ribu dan terendah adalah Tolikara yaitu 1007,436 ribu dan Kota Cirebon memiliki daya beli 11.800 ribu. Melalui penghitungan tersebut didapat indeks saya beli Kota Cirebon berada pada poin 75,2

4. Isu Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata serta belum optimalnya pengembangan manajemen pariwisata dan aset pariwisata. Pada bidang kebudayaan terjadi beberapa

permasalahan yang ditandai oleh menurunya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Cirebon, hal tersebut disebabkan belum optimalnya pelestarian Nilai Budaya Cirebon yang memiliki kekayaan warisan budaya keraton, belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai Aset Pariwisata Kota Cirebon, dan belum optimalnya pengembangan ragam Seni Tradisional Cirebon. Sebagai akibat kurangnya pengelolaan kekayaan dan keragaman seni dan budaya tersebut, nampak beberapa kesenian tradisional Cirebon yang hamper punah, seperti Seni Pertunjukan Tarling.

Perkembangan Isu ini mengalami kemajuan pada tahun 2019 dengan terselenggaranya banyak kegiatan berbasis budaya dan sejarah, namun pada tahun 2020 dengan kondisi pandemi yang diakibatkan Covid 19 menjadi kendala utama dalam terselenggaranya kegiatan berbasis budaya dan sejarah.

5. Isu Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam menjalankan pemerintahan, dikenal konsep *good governance* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. ketika sebuah daerah ingin menyelenggarakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik, perlu analisis menyeluruh di berbagai lini agar perbaikan yang dilakukan dapat optimal. Kasus-kasus yang saat ini terjadi di Kota Cirebon membuat perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dan perlu perhatian khusus. Selain tindakan penanggulangan seperti monitoring dan pengawasan, perlu juga tindakan pencegahan seperti pembentukan karakter dan integritas aparatur.

6. Isu Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang inklusif diperlukan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Tingkat kondusifitas masyarakat juga menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi

investor untuk berinvestasi di Kota Cirebon.. Oleh karena itu, penegakan peraturan perundang-undangan mutlak diperlukan untuk menciptakan kondusifitas dan kenyamanan dalam beraktivitas. Upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah akan terwujud jika kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat.

Perkembangan kondusifitas dan stabilitas diantaranya tercermin pada jumlah kasus konflik SARA di Kota Cirebon, pada tahun 2019-2020 jumlah kasus terkait konflik tersebut adalah 0 kasus. Selain hal tersebut jumlah titik rawan gangguan kemananan pun menurun dari tahun, tahun 2020 jumlah titik rawan keamanan berjumlah 43. Kondusifitas dan kemanan yang cenderung stabil tersebut merupakan upaya dari berbagai Stake Holder bukan hanya Pemerintah Daerah Kota Cirebon namun seluruh unsur Forkopimda serta masyarakat Kota Cirebon. Meski kondisi cenderung baik isu ini merupakan isu strategis yang mesti dipertahankan dan ditingkatkan kondisinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, keterkaitan antara permasalahan pokok pembangunan dengan isu-isu stragtegis pembangunan beserta prioritas pembangunan dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2018-2023

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.	Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
2.	Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Isu Kemiskinan, Pengangguran dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.	Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berkelanjutan
3.	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur perkotaan.	Isu Peningkatan Pemerataan Pembangunan	

		di Seluruh Wilayah Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	
4.	Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mengalami pelambatan	Isu Produktivitas Daya Saing Ekonomi Secara Berkelanjutan	Peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi
5.	Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.	Isu Pemajuan Kebudayaan dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah.	Pemajuan kebudayaan dan pengembangan destinasi pariwisata
6.	Belum optimalnya kinerja penyelenggara- an pemerintahan daerah dan pelayanan publik; dan	Isu Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Meningkatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Isu Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum

Sumber: Dokumen RPJMD 2018-2023

Selain isu strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah, pada tahun 2020 muncul kejadian *force Major* atau kejadian luar biasa dengan adanya pandemi yang disebabkan oleh Covid 19.Pandemi ini menjadi salah satu isu strategis yang membutuhkan fokus penanganan prioritas. Pandemi covid 19 mempengaruhi berbagai sektor tak hanya pada sektor kesehatan, namun sektor lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan ketahanan. Salah satu sektor paling terdampak adalah ekonomi, berbagai analisa memprediksi jika tidak tepat dalam penanggulangan *pandemi covid 19* maka ekonomi akan terus mengalami perlambatan, sehingga isu ini menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon bersinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengambil kebijakan penangan pandemi ini yang secara garis besar di bagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Test, Pemerintah Daerah Kota Cirebon melaksanakan pendeteksian terhadap potensi penderita Covid 19 dengan melakukan tes massal terhadap masyarakat, sehingga dapat ditemukan penderita covid 19
2. Trace, melalui mekanisme *tracing* terhadap penduduk yang memiliki kontak erat dengan penderita, memudahkan pemetaan potensi baru perkembangan covid-19.
3. Treatment, Upaya Pemulihan pasien Covid-19 dan isolasi terhadap penderita dilaksanakan pada 9 Rumah Sakit di wilayah Kota Cirebon
4. Prevention

Prevention atau Pencegahan menjadi fokus penting dalam penanganan pandemic covid-19 di Kota Cirebon, pencegahan dilaksanakan dengan serangkaian kebijakan pendukung sebagai upaya strategi pencegahan yang efektif dan efesien,